

Menalar Demokrasi dalam Masyarakat Sipil: Teori dan Gagasan Baru dalam Pemikiran Gideon Baker

Amelia Erisanna¹, Merly Septia Afsani Akbar²

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia
amelia.erisanna@gmail.com¹, merlyseptiaa@gmail.com²

Submitted: 08th Oct 2024 | **Edited:** 11th Jan 2025 | **Issued:** 15th January 2025

Cited on: Erisanna, A., & Akbar, M. S. A. (2025). Menalar Demokrasi dalam Masyarakat Sipil: Teori dan Gagasan Baru dalam Pemikiran Gideon Baker. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 283-290.

ABSTRACT

Civil society plays an important role in the development and consolidation of democracy, especially in creating space for political participation, policy advocacy, and oversight of the government. In this context, Gideon Baker's *Theorising the Democracy of Civil Society* offers a new perspective on the role of civil society in shaping democracy independent of state domination. Baker proposes that democratisation is not only dependent on the state, but can also develop through self-organisation in civil society. This view criticises traditional theories of democracy that focus too much on the state as the main actor in the democratisation process. The theoretical study in this research refers to Baker's thoughts on democracy that is rooted in civil society and not tied to state structures. Other literature also suggests that although civil society plays an important role in democracy, it often faces external and internal challenges, including autocratisation and restrictions on civil liberties. The purpose of this research is to analyse more deeply Baker's ideas and examine their relevance in the context of contemporary democracy, especially in developing or authoritarian countries. The research method used is qualitative research with a book review approach, in which the researcher reads and analyses the book critically to explore the ideas and arguments put forward by the author, and compares them with existing literature. The results show that although Baker's concept of democracy in civil society still needs further development, it provides room for new thinking about a more inclusive and independent form of democracy. Suggestions for future research include exploring the application of this concept in social movements in developing or authoritarian countries and exploring how digital technology can strengthen civil society-based democracy.

Keywords: Democracy, Civil Society, Gideon Baker

PENDAHULUAN

Masyarakat sipil memainkan peran krusial dalam pengembangan dan konsolidasi demokrasi di berbagai negara. Sebagai entitas yang mandiri dari negara dan sektor bisnis, masyarakat sipil mencakup organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, komunitas lokal, dan berbagai bentuk asosiasi sukarela yang berfungsi sebagai jembatan antara individu dan institusi pemerintahan. Peran mereka mencakup advokasi kebijakan, edukasi politik, pengawasan terhadap pemerintah, dan pemberdayaan komunitas. Melalui aktivitas ini, masyarakat sipil berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik, akuntabilitas pemerintah, dan penguatan nilai-nilai demokrasi.

Teori demokrasi seringkali melihat masyarakat sipil sebagai ruang di mana warga negara dapat berinteraksi, berdiskusi, dan mengorganisir diri untuk mencapai tujuan bersama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip republikan yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam kehidupan politik. Masyarakat sipil dianggap memperkaya dinamika demokrasi dengan memberikan ruang bagi pluralitas suara dan memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, Gideon Baker melalui bukunya yang berjudul "Civil Society and Democratic Theory: Alternative Voices" mengembangkan gagasan mengenai model alternatif masyarakat sipil yang berkembang di luar kerangka demokrasi liberal. Baker menyoroti bagaimana konsep masyarakat sipil dapat menawarkan kemungkinan demokrasi baru yang lebih independen dari negara dengan merujuk pada contoh-contoh seperti gerakan Zapatista di Meksiko dan perubahan politik di Eropa Timur dan Amerika Latin (Baker, 2003).

Namun, peran masyarakat sipil dalam demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Di Indonesia, misalnya organisasi masyarakat sipil sering menghadapi tantangan baik dari faktor eksternal maupun internal. Secara eksternal, regulasi pemerintah dan dinamika politik dapat mempengaruhi efektivitas peran mereka. Secara internal, kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen menjadi faktor penentu dalam kontribusi masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi (Hadi, 2010). Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sipil memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan, pengaruhnya terhadap demokrasi masih terbatas oleh faktor-faktor struktural dan kontekstual yang ada.

Melihat tantangan tersebut, Baker dalam Chapter 9 bukunya yang berjudul "Theorising the Democracy of Civil Society" mengembangkan argumen yang lebih mendalam tentang demokrasi yang berakar pada masyarakat sipil yang terpisah dari dominasi negara. Dalam bab ini, Baker mempertanyakan kelayakan dan relevansi model demokrasi semacam itu dalam konteks saat ini, serta menantang pandangan tradisional yang mengaitkan masyarakat sipil secara langsung dengan demokrasi liberal. Baker mengusulkan alternatif di mana masyarakat sipil dapat menjadi basis bagi bentuk demokrasi yang lebih mandiri, di luar pengaruh negara (Baker, 2003).

Pemilihan Chapter 9 sebagai fokus dalam penelitian ini karena bab tersebut memberikan analisis yang lebih kritis dan mendalam dibandingkan dengan bab lainnya. Di chapter ini, Baker secara khusus membahas kemungkinan masyarakat sipil dalam

membangun demokrasi yang terlepas dari peran dominan negara yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam chapter lain. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana gagasan tersebut dapat diterapkan dalam konteks kontemporer dan relevansinya bagi perkembangan demokrasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

Tinjauan Literatur

Masyarakat sipil telah menjadi subjek penting dalam studi demokrasi, otokratisasi, dan gerakan pro-demokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana masyarakat sipil berfungsi dalam mendukung demokrasi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam berbagai jenis rezim politik. Kajian ini menggabungkan teori-teori dari beberapa jurnal untuk menggambarkan peran masyarakat sipil dalam konteks demokrasi dan otokratis.

Sombatpoonsiri (2024) dalam artikelnya yang berjudul *Civil Society and Autocratization* menjelaskan bahwa meskipun masyarakat sipil diharapkan dapat berfungsi sebagai penjaga demokrasi dalam beberapa situasi, otokratisasi dapat merusak ruang bagi masyarakat sipil untuk berfungsi secara bebas. Penurunan kebebasan sipil dan pembatasan aktivitas organisasi masyarakat sipil terjadi secara perlahan namun pasti, bahkan di negara-negara yang secara formal mengklaim diri sebagai demokrasi. Dalam beberapa kasus, rezim otoriter menggunakan taktik untuk membungkam suara masyarakat sipil termasuk dengan mengontrol organisasi non-pemerintah dan membatasi kebebasan berbicara. Otokratisasi menurut Sombatpoonsiri (2024) bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga proses sosial yang mempengaruhi masyarakat sipil dalam cara yang mendalam seperti mengubah peran masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan dan pemantauan pemerintah.

Bakardjieva et al. (2021) menyarankan bahwa media digital memainkan peran yang semakin penting dalam memperkuat masyarakat sipil di negara-negara demokrasi baru khususnya di Uni Eropa. Teknologi digital memungkinkan warga untuk mengorganisir diri, berkomunikasi, dan menyuarakan pendapat mereka secara lebih bebas dan efisien, meskipun juga memperkenalkan tantangan terkait disinformasi dan polaritas. Digitalisasi memberikan masyarakat sipil alat untuk mengatasi pembatasan yang diterapkan oleh rezim yang lebih otoriter, serta memperkenalkan model-partisipasi baru yang memodernisasi konsep kewarganegaraan. Meskipun demikian, Bakardjieva et al. (2021)

juga menunjukkan bahwa meskipun media digital dapat memperkuat gerakan sosial, ketergantungan pada teknologi dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperburuk polarisasi politik di beberapa negara.

Nasibov (2021) dalam artikelnya yang berjudul *Civil Society and Pro-Democracy Social Movements* mengkaji hubungan antara masyarakat sipil dan gerakan sosial pro-demokrasi dalam konteks rezim otoriter. Dalam banyak kasus, meskipun masyarakat sipil memainkan peran penting dalam melawan rezim otoriter, hubungan ini seringkali bersifat tegang dan tidak stabil. Pemerintah otoriter seringkali menanggapi tantangan dari masyarakat sipil dengan pembatasan kebebasan dan represifitas. Namun, Nasibov (2021) juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sipil beroperasi dalam ruang yang sangat terbatas, mereka tetap mampu memainkan peran strategis dalam gerakan pro-demokrasi, meskipun seringkali dengan risiko tinggi bagi anggota-anggota mereka.

Machin dan Ruser (2023) mengangkat topik tentang *Sustainability, Democracy, and the Dark Sides of Civil Society* dalam konteks bagaimana masyarakat sipil bisa berperan dalam membangun demokrasi yang lebih berkelanjutan, tetapi juga menunjukkan bahwa terdapat sisi gelap dari masyarakat sipil itu sendiri. Dalam beberapa kasus, organisasi masyarakat sipil bisa terjebak dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi seperti korupsi, eksklusivitas, dan elitisme. Mereka juga mengingatkan tentang fenomena "dark side" dari masyarakat sipil yang mengancam integritas dan keberlanjutan gerakan sosial yang dapat terjebak dalam ideologi atau kekuasaan tertentu yang justru memperburuk ketidaksetaraan sosial.

Gabor (2024) mengkaji faktor-faktor yang mengancam kebebasan sipil dan menganalisis bagaimana masyarakat sipil bisa dihadapkan pada tantangan serius dalam upaya mereka untuk mempertahankan kebebasan sipil. Gabor (2024) menjelaskan bahwa faktor-faktor eksternal seperti regulasi yang semakin ketat, tindakan represif dari negara, serta ketidakstabilan politik dapat membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Terlebih dalam negara-negara yang rentan terhadap otokratisasi, adanya tekanan untuk membatasi kebebasan sipil seringkali datang dalam bentuk kebijakan yang tidak transparan dan tidak demokratis. Oleh karena itu, analisis Gabor (2024) menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan sipil yang menjadi kunci untuk memperkuat demokrasi dan memastikan keberlanjutan masyarakat sipil itu sendiri.

Dari berbagai kajian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam demokrasi, namun mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang bisa mempengaruhi efektivitas mereka. Otokratisasi, ketergantungan pada teknologi digital, dan ketegangan dalam gerakan sosial pro-demokrasi menunjukkan bahwa masyarakat sipil tidak hanya menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga menghadapi tantangan internal. Selain itu, meskipun masyarakat sipil memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi, mereka juga terancam oleh kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dan oleh ketidaksetaraan dalam struktur sosial politik. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika ini sangat penting untuk mempertahankan dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode book review. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan mendalam isi dari sebuah buku yang relevan dengan topik tertentu, dalam hal ini mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan demokrasi. Dalam metode book review, peneliti membaca buku secara menyeluruh kemudian mengevaluasi dan menganalisis argumen-argumen yang diajukan oleh penulis, serta membandingkannya dengan literatur dan teori yang sudah ada. Peneliti kemudian menyusun kesimpulan berdasarkan analisis tersebut yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai topik yang dibahas dalam buku tersebut.

PEMBAHASAN

Dalam chapter 9 bukunya yang berjudul *Theorising the Democracy of Civil Society*, Gideon Baker mengajukan pemikiran tentang demokrasi yang berakar di masyarakat sipil yang terlepas dari dominasi negara. Baker menyoroti bahwa dalam banyak kasus, upaya demokratisasi tidak selalu bergantung pada tuntutan atau konsesi dari negara, tetapi lebih pada organisasi mandiri dalam masyarakat sipil yang menantang wacana dominan tentang negara. Konsep ini sangat relevan dalam konteks gerakan Zapatista di Meksiko yang menolak pemberian hak-hak dari negara dan lebih memilih membangun demokrasi yang berbasiskan pada kekuatan rakyat dan masyarakat sipil. Hal

tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang dibangun dalam masyarakat sipil dapat menawarkan alternatif yang berbeda dengan model demokrasi liberal yang dominan saat ini. Melalui bukunya, Baker menantang pandangan tradisional yang hanya mengaitkan demokrasi dengan negara dan negara yang demokratis.

Di sisi lain, konsep demokrasi dalam masyarakat sipil yang diusulkan Baker juga mengarah pada kritik terhadap teori demokrasi itu sendiri. Baker menunjukkan bahwa kita seringkali mengharapkan teori demokrasi untuk menawarkan solusi yang terperinci dan praktis, padahal sebaliknya gagasan demokrasi yang berasal dari masyarakat sipil ini lebih berfungsi untuk mengajukan pertanyaan baru tentang praktik politik daripada memberikan

Dalam pandangan ini, demokrasi yang dimaksud bukanlah hasil akhir yang jelas, melainkan sebuah ruang kemungkinan yang memungkinkan adanya pembaruan dan perubahan di luar kerangka negara. Konsep ini menanggapi ketidakpuasan dengan keadaan status quo yang seringkali terjebak dalam upaya reformasi negara tanpa memperhatikan kemungkinan bentuk-bentuk demokrasi yang lebih mandiri.

Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan dalam beberapa literatur sebelumnya. Brooks (2020) dalam penelitiannya tentang decolonising and re-theorising demokrasi di Afrika Selatan, mengusulkan pentingnya melihat demokrasi dari perspektif lokal dan mengkritik pemahaman demokrasi yang terpusat pada negara. Mereka mendukung gagasan untuk meninjau ulang teori-teori demokrasi yang dominan serupa dengan apa yang dikemukakan Baker yang menganggap masyarakat sipil sebagai arena alternatif bagi pembentukan demokrasi. Selain itu, Holloway (2023) dalam tinjauan sistematis tentang ketahanan demokrasi menekankan pentingnya melihat demokrasi tidak hanya sebagai struktur negara, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik sehari-hari yang sejalan dengan gagasan demokrasi yang berakar di masyarakat sipil.

Baker juga berpendapat bahwa meskipun model demokrasi yang ditawarkan dalam masyarakat sipil belum memiliki teori yang lengkap atau rinci, gagasan ini dapat memicu pemikiran baru tentang bagaimana demokrasi bisa terwujud di luar negara dan dapat membawa kesadaran baru terhadap potensi pemberdayaan diri dalam masyarakat sipil. Pendekatan ini mengingatkan kita pada pentingnya memberi ruang bagi berbagai bentuk perwujudan demokrasi di luar bentuk formal yang diatur oleh negara yang sangat relevan

dengan perkembangan konsep digital democracy yang dibahas oleh Fuchs (2021) yang menghubungkan demokrasi dengan partisipasi aktif masyarakat melalui media digital. Dengan demikian, pandangan Baker tentang demokrasi dalam masyarakat sipil memberikan perspektif yang sangat penting dalam memperluas horizon demokrasi dan menawarkan alternatif terhadap dominasi negara dalam politik. Meskipun demikian, gagasan ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat memberikan pedoman yang lebih jelas bagi praktik demokrasi di masa depan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan dalam chapter 9 buku *Theorising the Democracy of Civil Society* karya Gideon Baker, dapat disimpulkan bahwa konsep demokrasi yang berakar dalam masyarakat sipil menawarkan pandangan alternatif yang penting terhadap teori demokrasi tradisional yang cenderung terfokus pada negara. Baker menyoroti bahwa demokratisasi tidak selalu bergantung pada negara, tetapi dapat tercapai melalui kekuatan masyarakat sipil yang mandiri dan bertindak di luar kerangka negara. Pandangan ini membuka kemungkinan baru dalam membentuk demokrasi yang lebih inklusif dan terlepas dari dominasi negara seperti yang terlihat dalam gerakan Zapatista di Meksiko. Konsep ini mengarah pada kritik terhadap teori demokrasi yang ada dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi bisa berkembang melalui proses politik yang lebih mandiri dan tidak terikat pada struktur negara yang ada. Walaupun ide demokrasi dalam masyarakat sipil ini masih kurang terperinci dalam hal teori dan praktik, gagasan ini memberi ruang bagi pemikiran yang lebih luas tentang bagaimana demokrasi bisa diwujudkan di luar negara dan menjadi bentuk demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pandangan Baker ini juga beresonansi dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkritik dominasi negara dalam teori demokrasi dan mengusulkan untuk melihat demokrasi dari perspektif yang lebih lokal dan kontekstual yang sejalan dengan perkembangan konsep-konsep demokrasi digital yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui media digital.

Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan konsep demokrasi dalam masyarakat sipil, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang atau otoriter. Penelitian ini bisa fokus pada analisis lebih lanjut terhadap gerakan-gerakan sosial yang menantang struktur negara tradisional dan

membangun demokrasi berdasarkan inisiatif masyarakat. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana konsep digital democracy yang semakin berkembang dapat menjadi bagian dari demokrasi yang berakar dalam masyarakat sipil. Penelitian ini dapat melihat peran teknologi digital dalam memperluas partisipasi publik dan menciptakan ruang demokratis yang lebih inklusif tanpa bergantung pada negara sebagai aktor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Baker, G. (2003). *Civil society and democratic theory: Alternative voices*. Routledge.
- Brooks, H., Ngwane, T., & Runciman, C. (2020). Decolonising and re-theorising the meaning of democracy: A South African perspective. *The Sociological Review*, 68(1), 17-32.
- Fuchs, C. (2021). The digital commons and the digital public sphere: How to advance digital democracy today. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 16(1).
- Gabor, E. (2024). How Civil Societies Are Undermined: An Analysis of Factors That Endanger Civic Freedoms. *Civil Szemle*, 21(2), 47-65.
- Bakardjieva, M., Bengtsson, S., Bolin, G., & Engelbrekt, K. (2021). *Digital media and the dynamics of civil society: Retooling citizenship in new EU democracies*. Rowman & Littlefield.
- Blomberg, F., & Szöcsik, E. (2014). Participation in civil society organizations and political parties in post-communist Europe: The impact of political divides. In *Civil society and democracy promotion* (pp. 191-213). London: Palgrave Macmillan UK.
- Cassidy, C., & Robinson, C. (2022). Theorising voice and democracy. In *The Theory and Practice of Voice in Early Childhood* (pp. 3-9). Routledge.
- Hadi, O. H. (2010). Peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117-129.
- Holloway, J., & Manwaring, R. (2023). How well does 'resilience' apply to democracy? A systematic review. *Contemporary Politics*, 29(1), 68-92.
- Machin, A., & Ruser, A. (2023). Introduction: Sustainability, Democracy and the Dark Sides of Civil Society. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 36(3), 297-309.
- Nasibov, M. (2021). Civil Society and Pro-Democracy Social Movements: Troubled Relations Within Authoritarian Regimes?. *Frontiers in Political Science*, 3, 708872.
- Regmi, K. D. (2024). Political economy model of program planning: adult education for marginalised adults, civil society and democracy. *Studies in Continuing Education*, 46(3), 365-381.
- Sombatpoonsiri, J. (2024). Civil society and autocratization. In *The Routledge Handbook of Autocratization* (pp. 305-317). Routledge.